

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung. Sebagai salah satu ibukota, Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial-politik, pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Kota ini diuntungkan dengan wilayahnya yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku (*heterogen*), dari hasil proyeksi tahun 2008, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 822.880 jiwa, terdiri atas 414.938 penduduk laki-laki dan 407.942 penduduk perempuan. Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada 5⁰20' sampai dengan 5⁰30' Lintang Selatan dan 105⁰28' sampai dengan 105⁰37' Bujur Timur. Letak tersebut berada di Teluk Lampung dibagian selatan Provinsi Lampung dan diujung selatan Pulau Sumatera, yang memiliki luas wilayah 192,18 km² terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan Ketibung Lampung Selatan serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Tabel 1.

Nama Kecamatan se-Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Tanjungkarang Pusat	Palapa	20,54	11
2	Tanjungkarang Barat	Gedong Air	8,63	6
3	Tanjungkarang Timur	Kota Baru	23,99	11
4	Telukbetung Utara	Kupang Kota	21,1	10
5	Telukbetung Barat	Bakung	9,95	8
6	Telukbetung Selatan	Sukaraja	5,67	11
7	Panjang	Karang Maritim	17,43	7
8	Kemiling	Beringin Raya	22,89	7
9	Kedaton	Kampung Baru	8,88	8
10	Rajabasa	Rajabasa	13,02	4
11	Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	12,62	4
12	Sukarame	Way Halim Permai	16,87	5
13	Sukabumi	Sukabumi	10,59	6
Jumlah			192,18	98

Sumber: Selayang Pandang Kota Bandar Lampung, 2009: 3&26, Kota Bandar Lampung dalam Angka , 2009: 11

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut. Berikut nama-nama Walikota yang pernah menjabat di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.

Walikota Bandar Lampung dari Tahun 1956-2009

No	Walikota	Periode
1	Sumarsono	1956 – 1957
2	H. Zainal Abidin PA	1957 – 1963
3	Alimudin Umar, SH	1963 – 1969
4	Drs. H.M. Thabrani Daud	1969 – 1976
5	Drs. Fauzi Saleh	1976 – 1981
6	Drs. Zulkarnain Subing	1981 – 1986
7	Drs. H.A. Nurdin Muhayat	1986 – 1995
8	Drs. H. Soenarto	1996 – 2005
9	Eddi Sutrisno, S.Pd., M.Pd	2005 – 2009
10	Drs. Herman HN. SH. MH	2009 -

Sumber: Selayang Pandang Kota Bandar Lampung, 2009 : 24

B. Gambaran Mengenai Pasar Bambu Kuning

1. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning

Pasar Bambu Kuning merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Bandar Lampung dan salah satu pasar tertua setelah Pasar Bawah (Ramayana) dan Pasar Cimeng (Teluk Betung). Pasar ini merupakan tempat perputaran perekonomian masyarakat Bandar Lampung bahkan masyarakat luar Kota Bandar Lampung. Sebagai pasar induk, Pasar Bambu Kuning memiliki sejarah panjang dan telah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Pada zaman kolonial Belanda, Pasar Bambu Kuning akan menampakkan aktivitasnya sebagai pasar hanya di hari Sabtu saja sebab di zaman tersebut penentuan hari pasaran hanya ditentukan sehari dalam satu minggu. Jenis barang dagangannya juga ditentukan oleh Kolonial Belanda yakni berbagai macam jenis tekstil, kelontongan dan sedikit sayur mayur. Bentuk penggunaan pasar juga masih sederhana seperti umumnya pasar-pasar tradisional lainnya berupa tempat yang dipetak-petak dan dinding dibuat dari anyaman bambu yang beratapkan rumbia.

Adapun pembagian pedagang di zaman tersebut berupa :

- a. Pedagang tetap didalam kios menggunakan atap
- b. Pedagang tetap yang menggunakan tempat yang luas
- c. Pedagang keliling yang masuk pasar diluar atap
- d. Pedagang keliling yang masuk pasar didalam atap

Setelah kemerdekaan RI, dan pada tahun 1960 Lampung menjadi provinsi yang memisahkan diri dari Sumatera Selatan, Pasar Bambu Kuning masih sebatas pasar tradisional yang seperti pasar pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan kawasan pasar dahulunya merupakan pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung dan dikawasan tersebut pernah berdiri Kantor Walikota Bandar Lampung. Selain Kantor Walikota, dikawasan ini juga pernah berdiri markas komando distrik militer (kodim) yang dekat dengan rumah tahanan yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Oleh karena itu, tidak jarang warga kabupaten di luar Kota Bandar Lampung yang menyebut Kota Bandar Lampung sebagai Tanjung Karang, sebab dahulunya pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung berada di Tanjung Karang disekitaran Pasar Bambu Kuning.

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung dipindahkan di Jalan Dr. Susilo dan Markas Kodim kini berada di Jalan Imam Bonjol. Kondisi tersebut juga berdampak pada Pasar Bambu Kuning yang mulai ramai pada tahun 1963 dan Pasar Bambu Kuning akhirnya mengalami perubahan yang dibangun secara permanen dan luas. Masyarakat Jawa dan Sumatera berbaur menjadi satu mencari penghidupan dengan berjualan. Masyarakat Jawa lebih pada usaha perdagangan hasil bumi dan sayur mayur, sedangkan masyarakat Sumatera berjualan kebutuhan sandang. Adanya warga keturunan Tionghoa (Cina) dan India yang mendiami Pasar Bambu Kuning tempo dulu, lebih pada usaha perdagangan emas dan hasil bumi, seperti tembakau dan cengkih.

Dalam perkembangannya, Pasar Bambu Kuning mengalami beberapa kali pemugaran yang dilakukan renovasi awal pada tahun 1974. Sesuai dengan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Bandar Lampung No.170/BE.II.HK/1987 Tentang Penghapusan dan Pembangunan Kembali Pasar Bambu Kuning milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung, maka pada tahun 1990 mengalami pemugaran secara besar-besaran. Pemugaran yang dilakukan merubah bangunan permanen satu lantai yang kemudian dibangun menjadi tiga lantai hingga saat ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat menampung seluruh pedagang yang tiap tahun meningkat jumlahnya.

2. Letak dan Kondisi Pasar Bambu Kuning

Setelah mengalami pemugaran dan pelebaran pada tahun 1990, bentuk pasar terlihat seperti saat ini terdiri dari gedung berlantai III dengan luas tanah 500 m² dan tiap-tiap lantai berbeda fungsinya. Pada lantai I diperuntukkan bagi pedagang kios menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari termasuk kerajinan khas Bandar Lampung. Sementara itu, pada lantai II ditempati ratusan PKL yang barang dagangannya berupa pakaian, sepatu, buah-buahan, beraneka macam jam, toko mas , kerajinan khas Bandar Lampung dan mainan anak-anak, namun yang paling dominan adalah pedagang tekstil. Khusus untuk pedagang makanan sengaja ditempatkan di lantai III, karena meniru konsep tata ruang di pusat-pusat perbelanjaan modern pada umumnya, yakni sentra makanan berada pada lantai paling atas.

Letak Pasar Bambu Kuning berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang merupakan pusat dari Kota Bandar Lampung. Lokasi ini sangat strategis dan dapat dengan mudah dijangkau oleh semua masyarakat, dengan demikian Pasar Bambu

Kuning menjadi pasar pusat Kota Bandar Lampung. Adapun batas-batas dari Pasar Bambu Kuning adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bukit Tinggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batu Sangkar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan RA. Kartini

Jumlah pedagang di Pasar Bambu Kuning cukup banyak, setidaknya ada 1012 pedagang di lokasi yang berjualan. Adapun jumlah pedagang tersebut terbagi menjadi beberapa komposisi, antara lain :

Tabel 3.

Jumlah Pedagang Berdasarkan Klasifikasi Tempat Berjualan

No	Tempat Berdagang	Jumlah
1.	Toko / Kios	320 buah
2.	Los Amparan	378 buah
3.	Kaki Lima	314 buah
Total		1.012 buah

Sumber : Dinas Pasar Kota Bandar Lampung, 2012

Berdasarkan jumlah pedagang yang sangat tinggi yang ada di Pasar Bambu Kuning dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya, maka Pasar Bambu Kuning menjadi pusat perekonomian dan perbelanjaan masyarakat Bandar Lampung. Dengan demikian, keadaan yang tertib dan aman harus selalu dijaga oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung selaku aparat daerah yang memiliki wewenang tersebut.

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang berkedudukan di bawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana diatur pada Pasal 24. Adapun tugas utama dari Satpol PP Kota Bandar Lampung sebagaimana di atur dalam Pasal 25 Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terletak di Jalan Dr. Susilo No. 2 Kota Bandar Lampung, tepatnya berada di dalam Kompleks Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2008 Pasal 27, terdiri dari; (a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; (b) Seksi Bagian Tata Usaha; (c) Seksi Penegakkan Perda dan Perundang-undangan; (d) Seksi Kesamaptan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; (e) Seksi Pembinaan Masyarakat; (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung tersebut, maka tugas dari masing-masing susunan organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Satpol PP Kota Bandar Lampung

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pembinaan ketentraman, ketertiban, kedisiplinan, pengendalian dan koordinator penegakkan perda serta melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Walikota.

2. Seksi Bagian Tata Usaha

Seksi bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian dan keuangan merupakan tugas utama dari seksi bagian tata usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut; (a) Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan serta tata usaha kantor; (b) Melaksanakan urusan kepegawaian; (c) Melaksanakan urusan keuangan

3. Seksi Penegakkan Perda dan Perundang-undangan

Seksi penegakkan perda dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Adapun tugas pokok dari seksi penegakkan perda dan perundang-undangan yakni melaksanakan operasi penegakkan perda dan penyidikan, serta melaksanakan penindakan terhadap oknum aparat pemerintah kota yang melanggar peraturan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi penegakkan perda dan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan operasi penegakkan perda dan perundang-undangan
 - b. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat
 - c. Melakukan penyidikan dan penindakan
 - d. Melaksanakan operasi penegakkan perda yang bersifat pembinaan atau *nonyustisi*
 - e. Melaksanakan operasi yang bersifat *refresif* atau yustisi dalam pemeriksaan cepat dan singkat
 - f. Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap oknum aparat pemerintah kota yang terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran yang mengarah kepada tindakan kriminal
 - g. Meminta petunjuk kepada Polri selaku koordinator pengawas penyidik pegawai negeri sipil
4. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum di pimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Melaksanakan kesamaptaan, kegiatan kesehatan jasmani, pengamanan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tugas utama dari seksi ini.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi kesamaptaaan, ketentraman dan ketertiban umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan-bahan yang berkenaan dengan kegiatan kesamaptaaan, kesehatan jasmani bagi anggota polisi pamong praja
- b. Perencanaan dan pelaksanaan latihan-latihan, pendidikan dan keterampilan
- c. Pelaksanaan pembinaan kesamaptaaan untuk menjaga kestabilan fisik anggota
- d. Penyiapan kekuatan personil untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas di ruas jalan yang ada didalam lingkungan pasar dan dilingkungan lainnya yang dipandang perlu
- e. Penjagaan keamanan ditempat-tempat keramaian serta penertiban pedagang kaki lima
- f. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban kota
- g. Pelaksanaan penjagaan terhadap kantor Pemerintahan Kota, Gedung Dharma Wanita (PKK), dan rumah-rumah pejabat teras Pemerintah Kota
- h. Pelaksanaan pengawalan terhadap rombongan tamu dan pejabat VIP yang berkunjung ke Kota Bandar Lampung
- i. Pelarangan terhadap tukang becak yang mangkal ditempat-tempat rawan lalu lintas dan daerah bebas becak

5. Seksi Pembinaan Masyarakat

Seksi pembinaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Tugas pokok dari seksi pembinaan masyarakat yakni melaksanakan pembinaan masyarakat umum, mengadakan

penyuluhan ketentraman dan ketertiban, sosialisasi perda serta pemotretan terhadap kegiatan-kegiatan penting sebagai dokumen.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi pembinaan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat umum, pedagang kaki lima, tukang becak dan anak jalanan bersama-sama dinas terkait
- b. Pelaksanaan sosialisasi perda dan perundang-undangan lainnya bersama-sama dinas terkait
- c. Pelaksanaan penyuluhan ditempat-tempat rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penyiapan bahan-bahan pertimbangan yang berkembang mengenai ketentraman dan ketertiban dalam rangka pemberian izin terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya (keramaian pasar malam, hiburan-hiburan rakyat, komidi putar, layar tancap, keramaian obral dan pengobatan tradisional)
- e. Pemantauan pelaksanaan perizinan yang diberikan
- f. Penginventarisan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberian izin perlombaan-perlombaan dan keramaian serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- g. Pelaksanaan menghimpun, mengelola data serta informasi dan menyiapkan bahan penyusunan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya

Adapun struktur organisasi dari Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung

